**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Ketahanan pangan secara harfiah memiliki dua arti, yaitu (1) tersedianya pangan di masyarakat pada setiap saat dan setiap tempat serta (2) setiap rumah tangga mampu mengaksesnya. Kedua arti tersebut saling terkait karena kendati pasokan pangan di masyarakat cukup tersedia, tidak akan bernilai "ketahanan" jika rumah tangga tidak mampu mengaksesnya. (Sutarman, Opini Pikiran Rakyat, 28 Agustus 2010)

Dalam UU No. 18/2012 tentang Pangan disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, dalam hal ini khususnya masyarakat Jawa Barat, makanan pokok adalah beras. Jadi jika kita membahas ketahanan pangan akan identik dengan membahas kecukupan beras.

Kecukupan beras jika ditinjau dari kuantitas produksi menunjukkan angka yang cenderung meningkat, baik karena kemajuan teknologi maupun bertambahnya luas panen. Deptan (2012) melaporkan produksi padi nasional tahun 2011 mencapai 65,76 juta ton (setara 40,84 juta ton beras), Jawa Barat 11,6 juta ton, Jawa Tengah 9,39 juta ton, Jawa Timur 10,58 juta ton, sementara produksi padi luar jawa 31.352.347 juta ton. Pada Tabel 1. Di bawah terlihat besaran produksi gabah di daerah Jawa dan luar Jawa pada tahun 2008 hingga 2011.

Tabel 1. Produksi gabah di Indonesia tahun 2008 hingga 2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Wilayah** | **Produksi Gabah tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 (ton)** |
| 1 | DKI Jakarta | 8,35 ribu, 11,01 ribu, 11,16 ribu dan 9,5 ribu |
| 1 | Jawa Barat | 10,11 juta, 11,32 juta 11,74 juta dan 11,63 juta |
|  2 | Jawa Tengah | 9,14 juta, 9,60 juta 10,11 juta dan 9,39 juta |
| 3 | Jawa Timur | 10,47 juta, 11,26 juta 11,64 dan 10,58 juta |
| 4 | Bali | 0,84 juta, 0,88 juta, 0,87 dan 0,86 juta |
| 5 | Sumatra | 13,60 juta, 14,70 juta, 15,20 dan 15,69 juta |
| 6 | Kalimantan | 4,38 juta, 4,39 juta, 4,43 dan 4,57 juta |
| 7 | Sulawesi | 6,58 juta, 6,85 juta, 7,03 juta dan 7,28 juta |
| 8 | Maluku | 75,83 ribu, 89,87 ribu, 83,11 ribu dan 87,47 ribu |
| 9 | Papua | 0,13 juta, 0,135 juta, 0,137 juta dan 0,145 juta |
| 10 | NTB | 1,75 juta, 1,87 juta, 1,77 juta dan 2,07 juta |
| 11 | NTT | 0,58 juta, 0,61 juta, 0,55juta dan 0,59 juta |

Sumber : Badan Pusat Statistik (2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012)

Produksi padi nasional untuk tahun 2011 mencapai lebih dari 68,062 juta ton, sedangkan Jawa Barat mampu menghasilkan 11,6 juta ton (laporan dinas pertanian tnaman pangan Prov. Jawa Barat, 12 Sept. 2012). Dengan kata lain, kontribusi Jawa Barat terhadap pengadaan gabah nasional mencapai hampir 17 persen, merupakan kontribusi terbesar dalam menopang ketahanan pangan nasional, disusul provinsi Jatim, Jateng, Sulsel, Sumut, Sumsel, Lampung, Sumbar, Banten dan provinsi lainnya.

Tabel 2. Produksi dan konsumsi beras di kabupaten/kota Jawa Barat tahun 2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kota/Kabupaten | Produksi dan konsumsi beras (ribuan ton) | No | Kota/Kabupaten | Produksi dan konsumsi beras (ribuan ton) |
| 1 | Kota Bekasi | 4,58 dan 331,80 | 15 | Kab. Bdg. Barat | 222,90 dan 215,10 |
| 2 | Kab. Bekasi | 574,79 dan 374,37 | 16 | Kab. Garut | 907,01 dan 341,83 |
| 3 | Kota Depok | 4,99 dan 247,49 | 17 | Kab. Indramayu | 1.415,05 dan 236,53 |
| 4 | Kota Bogor | 9,16 dan 135,11 | 18 | Kab.Sumedang | 460,21 dan 155,45 |
| 5 | Kab. Bogor | 497,71 dan 678,48 | 19 | Kab. Majalengka | 586,69 dan 165,88 |
| 6 | Kota Sukabumi | 24,38 dan 42,46 | 20 | Kota Cirebon | 3,84 dan 42,13 |
| 7 | Kab. Sukabumi | 724,03 dan 333,13 | 21 | Kab. Cirebon | 522,97 dan 293,90 |
| 8 | Kab. Karawang | 1.135,86 dan 302,66 | 22 | Kab Kuningan | 383,97 dan 147,25 |
| 9 | Kab. Purwakarta | 217,81 dan 121,23 | 23 | Kab. Ciamis | 684,84 dan 217,90 |
| 10 | Kab. Cianjur | 790,82 dan 308,76 | 24 | Kota Tasikmalaya | 77,70 dan 182,39 |
| 11 | Kab. Subang | 1.059,91 dan 208,33 | 25 | Kab. Tasikmalaya | 808,91 dan 238,22 |
| 12 | Kota Cimahi | 3,276 dan 77,15 | 26 | Kota Banjar | 42,41 dan 24,90 |
| 13 | Kota Bandung | 5,67 dan 346,22 |  |  |  |
| 14 | Kab. Bandung | 464,43 dan 452,20 |  |  |  |

Sumber : Badan Pusat Statistik (2011 dan 2012) dan Kementrian Pertanian 2011

Jika rendemen beras 60 persen dari volume produksi 11 juta ton gabah kering giling (GKG), volume beras menjadi 6,6 juta ton, sedangkan tingkat konsumsi rata-rata 105 kg/kapita/tahun, maka volume beras Jabar jika dikonsumsi masyarakatnya adalah 4,2 juta ton dalam setahun. Berdasarkan ilustrasi kasar tersebut, kondisi Jabar termasuk kategori surplus 2,4 juta ton karena tingkat pasokan lebih besar dibandingkan dengan permintaan. Apakah ini berarti ketahanan pangan masyarakat (khusus beras) Jabar sudah tercapai?

Kegiatan distribusi beras sangat rumit, karena terlalu banyak "pemain", mulai tataran on farm, off farm, dan tata niaganya. Produsen gabah adalah petani dengan tingkat pemilikan lahan sangat sempit, produsen beras dengan kapasitas penggilingan kecil-kecil, pedagang dengan omzet kecil sehingga secara ekonomis kegiatan bisnis ini tidak sesuai dalam skala ekonomi, dan perolehan margin pemain bisnis ini sangat kecil.

Proses distribusi sangat bergantung pada disparitas volume pasokan dan harga. Jika pada suatu lokasi pasokan berkurang harga akan meningkat, dan aliran barang secara alamiah akan bergeser dari daerah surplus dengan harga tertentu ke daerah minus dengan harga yang lebih tinggi. Hal itu selalu terjadi karena pasar beras nasional telanjur menganut pasar terbuka, pola distribusi beras sangat ditentukan mekanisme penawaran dan permintaan, serta daya tarik harga. Akibatnya, stabilitas dan disparitas harga sulit terkendali.

Apakah benar Jabar secara nyata mengalami surplus dan kebutuhannya mampu dipenuhi produksi beras Jabar sendiri?

Ada baiknya memperhatikan kinerja Pasar Induk Cipinang, Jakarta yang menjadi tolok ukur pasar perberasan nasional dan bertindak sebagai stok penyangga untuk masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Kapasitas Pasar Induk Cipinang sekitar 600.000 ton beras setahun dan hampir 70 persen berasal dari Jabar. Dengan pasar ini, DKI mampu menentukan stok amannya selama dua minggu, sedangkan Jabar belum mampu karena belum ada prasarana, sarana, dan mekanisme untuk mengendalikan stok.

Banyak juga beras Jabar masuk ke provinsi lain bahkan "diantarpulaukan". Hal itu berarti, prestasi on farm Jawa Barat yang sudah baik, belum diimbangi kebijakan off farm karena tidak terserap secara maksimal untuk masyarakat Jabar. Namun, jika masuk musim "paceklik" beras Jabar yang sudah keluar terpaksa masuk kembali ke Jabar dengan harga lebih mahal. Jika mekanisme distribusinya masih seperti saat ini, secara faktual Jabar belum memiliki status surplus beras. Bagaimana dengan peran pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas strategis tersebut?

Permasalahan di atas rentan sekali timbul karena para pemangku kepentingan, mulai dari masayarakat pengguna, petani penggarap, pemerintah daerah maupun perum Bulog sepertinya saling menduga jika kondisi beras/ gabah di suatu daerah aman adanya. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan akurat akan kondisis perberasan sampai satuan daerah yang terkecil, sehingga jika informasi tentang kondisi perberasan secara actual dapat dengan mudah diperoleh, penentuan sentra penyimpanan serta kapasitasnya akan mudah untuk dilakukan.

Kebijakan perberasan paling baru adalah Inpres No. 3 Tahun 2012 yang mulai berlaku 27 Pebruari 2012, menginstruksikan kepada menteri koordinator dan menteri terkait, kepala badan, gubernur, bupati/wali kota untuk mendorong dan memfasilitasi, serta mengendalikan semua yang terkait dengan kegiatan on farm perberasan. Inpres tersebut juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP).

Pembelian berdasarkan HPP dilaksanakan oleh Bulog dan hanya mengatur tentang harga dasar (floor price), tidak mengatur harga jual (selling price) sehingga tidak ada batas maksimum harga jual. Akibatnya, fluktuasi harga bisa sangat tinggi dan sangat boleh jadi tak terkendali karena tidak mengatur batas kontrol atas harga jual. Akibatnya, stabilitas dan disparitas harga sulit dikendalikan dan Bulog sulit memposisikan dirinya sebagai price stabilizer. Memang kebijakan ini dirancang untuk merangsang aktivitas perdagangan beras agar bisnis beras tetap ramai. Bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses beras pada harga pasar, pemerintah menyediakan skim melalui pengadaan Raskin sehingga pasar beras dibiarkan terbuka. Sementara itu, masyarakat yang tidak mampu dilakukan subsidi.

Walaupun volume produksi gabah Jawa Barat lebih tinggi dibanding konsumsi masyarakatnya, namun jumlah stock yang dimiliki Jawa Barat tidak dapat diketahui secara pasti, sehingga menyulitkan pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Seperti telah disebutkan di atas produksi gabah kering giling Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 sebesar 11,63 juta ton sementara konsumsi sebesar 6,22 juta ton atau surplus sebesar 5,41 juta ton. Secara kasat mata angka produksi gabah Provinsi Jawa Barat dapat memeuhi hampir dua tahun kebutuhan internal provinsi ini. Atau seandainya jika seluruh sisa konsumsi gabah Jawa Barat disimpan dan kemudian pada tahun 2012 Jawa Barat gagal panen secara total, maka provinsi ini ‘hanya’ perlu mendatangkan beras dari luar provinsi sebanyak 0,81 juta ton atau hanya 15% dari kebutuhan, suatu harapan yang bagus. Sutarman, *Opini Pikiran Rakyat*, 28 Agustus 2010)

Namun angka di atas kertas sepertinya jauh dari kenyataan di lapangan. Sepertinya semangat dari semua pelaku pertanian terlalu tinggi untuk mengkonversi gabah/beras menjadi alat tukar yang lebih mudah. Seringkali informasi dari data secara global menjadikan berbagai pihak terlena dan beranggapan ketahana pangan di Jawa Barat sudah berjalan aman dari waktu ke waktu. Sudah saatnya pemerintah Provinsi sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan beras/gabah di Jawa Barat membuat sistem pemetaan dengan entitas sekecil mungkin sehingga dapat mengetahui keadaan stok secara real time tentang aman rentannya kondisi cadangan beras masyarakat Jawa Barat. Suatu sistem yang mampu memberikan informasi secara rinci ‘pergerakan’ gabah/beras di wilayah Jawa Barat.

* 1. **PERUMUSAN MASALAH**

Tesis ini mengkaji sistem informasi logistik beras di Jawa Barat dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi stok beras agar dapat mengetahui kondisi ketahanan pangan Jawa Barat secara ‘real time’.
2. Bagaimana membuat aplikasi Sistem Informasi cadangan beras Jawa Barat
	1. **MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**
		1. **Maksud**

Untuk mengetahui jumlah produksi, konsumsi serta distribusi beras ke dan dari Jawa Barat secara mudah dan cepat.

* + 1. **Tujuan**

Merancang Sistem Informasi Logistik Beras di Jawa Barat, sehingga dengan mudah dan cepat dapat:

1. Memeproleh informasi berapa persediaan beras di Jawa Barat
2. Memeperoleh informasi peta kecukupan beras masyarakat Jawa Barat
3. Memperoleh sistem keputusan yang dapat mengantisipasi dengan cepat jika terjadi kerawanan pangan dan mitigasi
	1. **PEMBATASAN MASALAH**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pola distribusi beras di Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan berdasar pada data yang diperoleh dari sumber informasi yang biasa berkaitan dengan urusan beras, dalam hal ini bisa dari Biro Pusat statistik Jawa Barat (BPS Jabar), Perum Bulog Divre Jawa Barat ataupun dari Penyuluh Pertanian.

Analisis kajian dibatasi untuk sistem distribusi beras di Jawa Barat, yaitu besar produksi beras, besar konsumsi beras, serta beras yang masuk dan keluar dalam setiap musim. Analisis deskriptif digunakan untk menjelaskan saluran distribusi , struktur pasar, perilaku pasar, dan keragaman pasar beras di wilayah Jawa Barat. Selain itu digunakan juga analisis kuantitatif menggunakan pendekatan teori: manajemen persediaan, manajemen logistik, sistem informasi manajemen, analisis input dan output, dan pemrograman.

* 1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil penelitian ini dituliskan dalam bentuk laporan penelitian, sehingga mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini. Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah dari penelitian ni serta tujuan dilakukannya penelitian terhadap tataniaga beras di Jawa Barat. Dalam bab ini pula disampaikan rumusan masalah dan batasan-batasan yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini, serta sistematika penulisan laporanpenelitian ini.

BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini dapat dilakukan berdasarkan dukungan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya. Pada bab ini disajikan teori-teori yang mendukung penelitian ini, di antaranya teori tentang manajemen persediaan, manajemen logistik, sistem informasi manajemen dan pemrograman.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan metode penelitian yang diuraikan melalui beberapa tahapan yang meliputi; Perumusan Masalah, Identifikasi Metoda Pemecahan Masalah, Pengamatan Objyek Penelitian, Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Analisis, dan Kesimpulan dan Saran.

BAB 4 : PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini akan disajikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta pengolahan data tersebut sampai dengan diperoleh atribut-atribut sebagai dasar pemodelan tataniaga beras di Jawa Barat.

BAB 5 : ANALISIS

Pada bab ini analisis terhadap distribusi gabah/beras di kala penen raya dan pemenuhan kebutuhan beras lokal Jawa Barat pada musim peceklik. . Berdasarkan analisis tersebut dapat digunakan untuk membuat model sistem inventori dan distribusi beras di Jawa Barat

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

* + Pada bab akhir ini berisikan hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu mengenai hasil evaluasi pola distribusi beras dan gabah pada saat panen raya.
	+ Strategi ketahanan pangan (beras) di Jawa Barat sepanjang tahun.